

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI REMPANG *ECO-CITY***

Fince Aulia, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

This research is motivated by the development of the Rempang Eco-City Transmigration Area as part of the National Strategic Project (PSN). The program has generated social dynamics related to transmigrant community participation in development and relocation processes. The area development aims to increase economic growth and investment. However, community involvement is essential to ensure policy legitimacy and sustainability. This study aims to analyze community participation in the development of the transmigration area and to identify the supporting and inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. The informants consist of BP Batam, the Rempang Eco-City Transmigration Area Development Working Unit, community leaders, local transmigrant fishermen, transmigrant residents, and academics. Data were analyzed through data reduction, data display, and verification using triangulation techniques. The results show that community participation remains dominant at the levels of information and consultation. Participation at the stages of deciding together, acting together, and supporting community is not yet optimal. Supporting factors include community willingness, capacity, and opportunity to participate. Inhibiting factors include stakeholder dominance, limited educational background, differences in age and gender, and livelihoods affected by relocation. This study concludes that more inclusive and collaborative participation mechanisms are needed. Transmigrant communities should become subjects of development rather than merely objects of policy.

Keywords: Community Participation, Transmigration Area, Rempang Eco-City, National Strategic Project

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini menimbulkan dinamika sosial terkait partisipasi masyarakat transmigran dalam pembangunan dan relokasi. Pembangunan kawasan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, keterlibatan masyarakat penting untuk menjamin legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri atas BP Batam, Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, tokoh masyarakat, nelayan transmigran lokal, masyarakat transmigran lokal, dan akademisi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat masih dominan pada tingkat *information* dan *consultation*. Keterlibatan pada tahap *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community* belum optimal. Faktor pendorong partisipasi meliputi kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat untuk terlibat. Faktor penghambat mencakup dominasi *stakeholder*, keterbatasan pendidikan, perbedaan usia dan jenis kelamin, serta mata pencaharian terdampak relokasi. Penelitian menyimpulkan perlunya mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan kolaboratif. Masyarakat perlu menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kawasan Transmigrasi, Rempang *Eco-City*, Proyek Strategis Nasional

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan strategis sering membawa perubahan sosial bagi masyarakat terdampak pembangunan wilayah. Proyek strategis nasional bertujuan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri sebagai bagian transformasi ekonomi nasional. Salah satu proyek tersebut adalah Rempang *Eco-City* di Kepulauan Riau (BP Batam, 2024).

Rempang *Eco-City* merupakan kawasan industri dan pariwisata dalam skema Proyek Strategis Nasional. Pengembangan kawasan ini bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah Kepulauan Riau. Proyek ini juga diharapkan menarik investasi besar dan membuka lapangan kerja baru. Pembangunan kawasan tersebut menjadi bagian strategi pembangunan nasional (BP Batam, 2024).

Pengembangan kawasan Rempang *Eco-City* melibatkan perubahan tata ruang dan relokasi masyarakat dari kampung lama. Relokasi masyarakat dilakukan sebagai bagian penataan wilayah dalam proyek pembangunan kawasan. Kebijakan relokasi bertujuan menyediakan hunian baru bagi masyarakat terdampak. Proses tersebut menjadi dinamika sosial dalam pembangunan wilayah (Kemenko Perekonomian RI, 2024).

Proses relokasi warga terdampak dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024. Pemerintah melakukan pendataan warga serta konsultasi mengenai rencana relokasi. Pendataan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan masyarakat. Progres relokasi warga terdampak dapat dilihat pada tabel berikut.

Periode	Keterangan Utama	Jumlah KK
Juni 2024	Warga terdampak teridentifikasi tahap I, Sebagian berkonsultasi, dan mendaftar relokasi.	961 KK terdampak 627 KK konsultasi 386 KK mendaftar 103 KK menempati hunian sementara
Agustus 2024	Progres peningkatan hunian sementara.	166 KK menempati hunian sementara
November 2024	Peningkatan jumlah hunian sementara dan awal hunian tetap.	220 KK menempati hunian sementara 42 KK menempati hunian tetap
Februari 2025	Penambahan KK menempati rumah baru.	58 KK menempati hunian tetap
Juni 2025	Total warga menempati rumah baru di Tanjung Banun terus bertambah.	106 KK menempati hunian tetap
November 2025	Progres terbaru relokasi menunjukkan peningkatan signifikansi jumlah penghuni rumah tetap.	125 KK menempati hunian tetap

Tabel 1.1 Progres Relokasi Warga Terdampak Proyek Rempang *Eco-City*

Sumber: BP Batam (2025)

Data tersebut menunjukkan

perkembangan relokasi warga dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Sebagian masyarakat telah menempati hunian baru di kawasan transmigrasi Tanjung Banun. Sebagian masyarakat masih menunda relokasi karena berbagai pertimbangan sosial. Situasi tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial dalam proses pembangunan (Komnas HAM, 2024).

Relokasi masyarakat sering menimbulkan respons beragam dari masyarakat terdampak pembangunan. Sebagian masyarakat menerima kebijakan relokasi sebagai bagian pembangunan wilayah. Sebagian masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan ruang hidup. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan industri juga berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan wilayah. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Pertumbuhan industri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kondisi ketenagakerjaan wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator	Nilai
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,21%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,39%
Jumlah Penduduk Bekerja	1,04 juta orang
Persentase Pekerja di Sektor Industri Pengolahan	33,17%
Persentase Pekerja di Sektor Perdagangan & Jasa	47,26%

Tabel 1. 1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Data ketenagakerjaan menunjukkan perlunya peningkatan kesempatan kerja di wilayah Kepulauan Riau. Pembangunan kawasan industri menjadi salah satu strategi

pemerintah. Kawasan industri baru diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Rempang *Eco-City* menjadi salah satu proyek yang diharapkan menciptakan peluang kerja.

Pembangunan kawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan investasi. Proses pembangunan juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat terdampak. Perubahan ruang hidup memengaruhi pola kehidupan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip penting dalam pembangunan wilayah. Partisipasi membuat masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberterimaan kebijakan pembangunan. Pendekatan partisipatif juga membantu mengurangi potensi konflik sosial (OECD, 2023).

Kajian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dibahas dalam studi pembangunan. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan tersebut mencakup tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dijelaskan dalam berbagai teori pembangunan.

David Wilcox menjelaskan lima tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tingkatan tersebut meliputi *information*, *consultation*, *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community*. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat. Analisis partisipasi masyarakat membantu memahami dinamika hubungan pemerintah dan masyarakat (Wilcox, 1994).

Konteks pembangunan Rempang *Eco-City* menunjukkan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat terdampak pembangunan. Kebijakan pembangunan sering bersifat *top-down*

dalam implementasinya. Masyarakat sering dilibatkan setelah keputusan strategis ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pengamatan awal menunjukkan partisipasi masyarakat masih berada pada tahap informasi dan konsultasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama masih terbatas. Situasi tersebut menunjukkan kesenjangan antara kebijakan pembangunan dan kesiapan sosial masyarakat. Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Rempang *Eco-City*.

KAJIAN TEORI

a) Partisipasi Masyarakat

Menurut David Wilcox (1994), partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri atas lima tingkatan sebagai berikut.

1. *Information*, yaitu tahap penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini masyarakat berperan sebagai penerima informasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. *Consultation*, yaitu tahap ketika masyarakat mulai dilibatkan melalui proses konsultasi atau penyampaian pendapat. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap kebijakan atau program yang direncanakan oleh pemerintah.
3. *Deciding Together*, yaitu tahap keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
4. *Acting Together*, yaitu tahap kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. *Supporting Community*, yaitu tahap ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan pembangunan secara

mandiri dengan dukungan pemerintah.

b) Faktor yang Berkontribusi terhadap Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet dalam Nurbati (2017) dan Irfani (2024), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong meliputi:

1. Kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan,
2. Kemampuan masyarakat dalam memahami manfaat pembangunan, dan
3. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Faktor penghambat meliputi:

1. Campur tangan *stakeholder*,
2. Usia,
3. Jenis kelamin,
4. Mata pencaharian, dan
5. Tingkat Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif deskriptif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*

a) Information (Informasi)

Partisipasi masyarakat dalam tahap informasi pada pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* terlihat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan *stakeholder* terkait. Informasi mengenai rencana pembangunan kawasan, relokasi masyarakat, serta program pengembangan wilayah disampaikan melalui pertemuan masyarakat, forum sosialisasi, dan komunikasi langsung dengan warga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memperoleh informasi mengenai kebijakan pembangunan kawasan, meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut masih beragam.

Masyarakat pada umumnya menerima informasi setelah kebijakan pembangunan disampaikan oleh pemerintah. Proses komunikasi masih cenderung bersifat satu arah, sehingga masyarakat berperan sebagai penerima informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat pada tahap awal pembangunan masih terbatas pada penerimaan informasi mengenai kebijakan pembangunan kawasan.

Menurut Wilcox (1994), tahap informasi merupakan bentuk partisipasi paling dasar dalam proses pembangunan. Pada tahap ini masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan, namun belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Priyanto et al. (2024) dan Hardani et al. (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali masih berada pada tahap penyampaian informasi oleh pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap informasi telah berlangsung, tetapi kualitas partisipasi masih terbatas.

b) Consultation (Konsultasi)

Partisipasi masyarakat dalam tahap konsultasi terlihat melalui kegiatan dialog dan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan kawasan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, serta aspirasi terkait rencana pembangunan

Kawasan Rempang *Eco-City*. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan.

Meskipun masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, proses konsultasi belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan. Pendapat masyarakat sering disampaikan setelah rencana pembangunan disusun oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsultasi yang dilakukan masih bersifat terbatas.

Menurut Wilcox (1994), tahap konsultasi merupakan bentuk partisipasi ketika masyarakat mulai dilibatkan dalam proses komunikasi pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, tetapi keputusan utama masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan Rempang *Eco-City* masih berada pada tahap konsultasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Priyanto et al. (2024) yang menjelaskan bahwa konsultasi publik sering kali hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tanpa memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pembangunan.

c) Deciding Together (Pengambilan Keputusan Bersama)

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan bersama masih menunjukkan keterlibatan yang terbatas. Keputusan strategis mengenai pembangunan kawasan, relokasi masyarakat, serta pengembangan infrastruktur sebagian besar masih ditentukan oleh pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat dalam proyek pembangunan. Masyarakat umumnya tidak terlibat secara langsung dalam proses penentuan kebijakan pembangunan kawasan.

Forum pertemuan masyarakat yang dilakukan lebih banyak berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan konsultasi. Masyarakat belum memiliki peran yang kuat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pembangunan masih didominasi oleh aktor formal.

Menurut Wilcox (1994), tahap *deciding together* merupakan bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Namun, pada kasus pembangunan Rempang Eco-City, keterlibatan masyarakat dalam tahap ini masih belum optimal sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gunawan dan Subadi (2021) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sering kali masih terbatas karena dominasi aktor formal.

d) Acting Together (Bertindak Bersama)

Partisipasi masyarakat dalam tahap bertindak bersama terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam beberapa kegiatan pembangunan kawasan. Masyarakat berperan dalam kegiatan sosial, diskusi komunitas, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. Bentuk partisipasi ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih bersifat terbatas dan belum merata. Sebagian masyarakat belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan kawasan karena berbagai faktor seperti pekerjaan, keterbatasan waktu, serta perbedaan pandangan terhadap pembangunan kawasan.

Menurut Wilcox (1994), tahap *acting together* menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini masyarakat tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hardani et al. (2019) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sering kali masih terbatas karena perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap ini telah ada, namun belum optimal.

e) Supporting Community (Dukungan terhadap

Komunitas)

Partisipasi masyarakat dalam tahap *supporting community* berkaitan dengan dukungan terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kawasan. Dukungan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Pada pengembangan Kawasan Rempang *Eco-City*, dukungan terhadap komunitas masih berada pada tahap awal. Program pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara merata. Hal ini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri.

Menurut Wilcox (1994), *supporting community* merupakan tingkat partisipasi tertinggi dalam pembangunan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri dengan dukungan pemerintah. Kondisi di Rempang *Eco-City* menunjukkan bahwa tahap ini masih perlu diperkuat agar partisipasi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mannayong dan Faisal (2024) yang menekankan bahwa dukungan terhadap komunitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan.

2. Faktor yang Berkontribusi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang Eco-City

a) Faktor Internal

1) Kemauan Masyarakat

Kemauan masyarakat menjadi faktor internal yang memengaruhi tingkat partisipasi dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Sebagian masyarakat menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam proses pembangunan kawasan karena adanya harapan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh dari pembangunan tersebut.

Kemauan masyarakat juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan

identitas sosial serta hak atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Dalam konteks pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*, keinginan masyarakat untuk terlibat muncul dari harapan bahwa pembangunan kawasan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di masa depan.

Menurut Slamet dalam Nurbaiti (2017), kemauan merupakan dorongan internal yang memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan. Kemauan yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wastiti et al. (2020) yang menyatakan bahwa kemauan masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan.

2) Kemampuan Masyarakat

Kemampuan masyarakat merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Kemampuan ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang dimiliki masyarakat dalam memahami kebijakan pembangunan kawasan.

Masyarakat yang memiliki kemampuan memahami informasi kebijakan dan proses pembangunan cenderung lebih aktif dalam menyampaikan pendapat maupun berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Kemampuan masyarakat juga berperan dalam proses negosiasi dengan pihak pemerintah maupun pengembang terkait kepentingan masyarakat terdampak pembangunan kawasan.

Menurut Naisabur dan Salsabila (2025), kemampuan masyarakat dalam memahami informasi pembangunan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gunawan dan Subadi (2021) yang menegaskan bahwa kapasitas masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3) Kesempatan Masyarakat

Kesempatan merupakan faktor internal yang berkaitan dengan peluang yang

diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*. Kesempatan partisipasi dapat muncul melalui adanya forum konsultasi publik, pertemuan masyarakat, serta mekanisme komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Namun dalam praktiknya, kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan masih dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah dalam menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat. Semakin terbuka akses masyarakat terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, maka semakin besar peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan.

Menurut Poespitohadi dan Fe (2023), kesempatan partisipasi merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Kesempatan yang luas dapat memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Naisabur dan Salsabila (2025) yang menunjukkan bahwa kesempatan partisipasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan.

b) Faktor Eksternal

1) Campur Tangan

Stakeholder

Campur tangan *stakeholder* menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Peran pemerintah dan pihak pengembang sangat dominan dalam proses pembangunan kawasan sehingga masyarakat memiliki ruang yang terbatas untuk menyampaikan aspirasi maupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dominasi *stakeholder* dalam proses pembangunan menyebabkan masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai objek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan kawasan masih bersifat *top-down* sehingga partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal.

Menurut Deviyanti dalam Irfani

(2024), dominasi *stakeholder* dalam pembangunan dapat membatasi ruang partisipasi masyarakat apabila mekanisme partisipasi tidak dirancang secara inklusif. Temuan ini sejalan dengan berbagai laporan yang menunjukkan bahwa pembangunan Rempang *Eco-City* masih didominasi oleh pendekatan pembangunan yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2) Usia

Usia merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan. Kelompok usia produktif cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosial maupun forum pertemuan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan.

Sebaliknya, masyarakat dengan usia lanjut cenderung memiliki keterbatasan dalam mengikuti berbagai kegiatan partisipasi karena faktor kesehatan maupun keterbatasan mobilitas. Perbedaan usia ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan tidak merata.

Menurut Irfani (2024), kelompok usia produktif umumnya memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lanjut dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chusnulitta et al. (2025) yang menunjukkan bahwa usia memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.

3) Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*. Dalam masyarakat transmigran, perempuan sering kali memiliki peran domestik yang lebih besar sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan publik menjadi terbatas.

Meskipun perempuan juga terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan kawasan, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan publik masih relatif rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor gender masih memengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan.

Menurut Irfani (2024), perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian

Jayanti (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan sering kali dipengaruhi oleh pembagian peran sosial dalam masyarakat.

4) Mata Pencarian

Mata pencarian merupakan faktor eksternal yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan. Jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat dapat memengaruhi ketersediaan waktu untuk mengikuti kegiatan sosial maupun forum konsultasi terkait pembangunan kawasan.

Masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi dalam pekerjaan sehari-hari sering kali mengalami keterbatasan waktu untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti forum konsultasi atau kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut Chusnulitta et al. (2025), tuntutan pekerjaan dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun pembangunan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pramono dan Suranto (2021) yang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

5) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami informasi pembangunan kawasan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan pembangunan.

Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memahami proses pembangunan yang kompleks. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat bersikap pasif terhadap kebijakan pembangunan kawasan yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Jayanti (2023), tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan individu dalam memahami informasi serta meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan

penelitian Gunawan dan Subadi (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* berlangsung pada lima tahapan partisipasi menurut David Wilcox, yaitu *information*, *consultation*, *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community*. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan masih belum merata. Partisipasi masyarakat paling dominan terjadi pada tahap *information* dan *consultation* melalui kegiatan sosialisasi serta forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif, serta dukungan terhadap penguatan komunitas masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan masih cenderung berada pada tingkat partisipasi awal yang bersifat informatif dan konsultatif.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan. Faktor internal meliputi kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan kawasan, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi pembangunan, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai forum komunikasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi campur tangan *stakeholder* dalam proses pembangunan, karakteristik sosial masyarakat seperti usia dan jenis kelamin, serta kondisi sosial ekonomi seperti mata pencaharian dan tingkat pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* telah berlangsung, namun masih memerlukan penguatan mekanisme partisipasi yang lebih kolaboratif agar masyarakat dapat berperan sebagai subjek dalam proses pembangunan kawasan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat,

berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yang difokuskan pada partisipasi yang hingga saat ini masih belum berfungsi secara optimal:

a. Tahapan *Information*

Tahapan informasi perlu diperkuat dengan memperbaiki cara penyampaian informasi agar lebih sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Pemerintah daerah, khususnya kelurahan/kawasan beserta perangkatnya, disarankan untuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara rutin sejak tahap perencanaan pembangunan, tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan program;
- 2) Memanfaatkan beragam sarana komunikasi, seperti pertemuan tatap muka, papan pengumuman di lingkungan warga, serta media digital, misalnya grup *WhatsApp* warga dan akun media sosial resmi kelurahan;
- 3) Menetapkan aparat atau kader informasi di tingkat RT/RW yang bertanggung jawab menyampaikan sekaligus menjelaskan informasi terkait pembangunan secara langsung kepada masyarakat.
- 4) Pola penyampaian informasi yang telah berjalan, seperti sosialisasi formal melalui musyawarah kelurahan, tetap perlu dipertahankan. Namun, intensitas dan jangkauannya harus ditingkatkan agar informasi tidak hanya diterima oleh kelompok tertentu saja.

b. Tahapan *Consultation*

Pada tahap konsultasi, pemerintah perlu memastikan bahwa proses konsultasi tidak sebatas formalitas, tetapi benar-

benar membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Menghidupkan kembali forum *rembug warga* di tingkat lingkungan untuk membahas rencana pembangunan secara lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi setempat;
- 2) Menyediakan posko, media, atau saluran pengaduan serta aspirasi yang mudah diakses, baik secara langsung maupun daring, sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan tanpa harus menunggu forum resmi;
- 3) Menjamin bahwa setiap hasil konsultasi dicatat, didokumentasikan, dan dapat diakses secara terbuka;
- 4) Apabila forum konsultasi sudah tersedia, ke depannya perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat, baik dari segi kehadiran maupun keberanian menyampaikan pendapat, agar konsultasi tidak hanya bersifat administratif.

c. Tahapan *Deciding Together*

Tahapan *deciding together* perlu diperkuat agar keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga berlanjut pada proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menyusun mekanisme yang jelas mengenai cara masukan masyarakat dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan;

- 2) Menyampaikan hasil keputusan secara terbuka, termasuk penjelasan terkait usulan yang diterima, yang belum dapat diakomodasi, beserta alasan dan alternatif kebijakan yang dipilih;
- 3) Melibatkan perwakilan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan program prioritas wilayah dan kebijakan yang berdampak langsung pada warga;
- 4) Jika selama ini masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah penetapan program, praktik tersebut perlu terus dilanjutkan agar tumbuh rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan.

d. Tahapan *Acting Together* dan *Supporting Community*

- 1) Memberikan dukungan konkret berupa pelatihan, pendampingan, serta bantuan permodalan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, seperti UMKM melalui Koperasi Merah Putih Sembulang, Koperasi Produsen Transmigrasi Banon Tanah Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
- 2) Mendorong pembentukan serta penguatan komunitas warga yang dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- 3) Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta,

organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi guna mendukung keberlanjutan komunitas dan aktivitas masyarakat;

- 4) Program pemberdayaan yang telah ada perlu terus dijalankan, dengan peningkatan pada aspek keberlanjutan, sehingga partisipasi masyarakat tidak bersifat sementara, melainkan berkembang menjadi keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Karim, A., & Nurdin, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Transmigrasi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Akre, U. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Delegata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–138.
- Alfaris, M. R. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 7(2).
- ANTARA News. (2024). *BP Batam Pastikan Rempang Eco-City Masuk PSN*.
- ANTARA News. (2025). *Relokasi Warga Rempang Dilakukan secara Bertahap*.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *RPJMN 2020–2024*.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2024). *Kota Batam dalam Angka 2024*.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2025). *Kota Batam dalam Angka 2025*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau*.
- BP Batam. (2024). *Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City*.
- BP Batam. (2025). *Laporan Perkembangan Relokasi Warga Rempang*.
- Cahayani, M. (2024). Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*.
- Chusnulitta, D. J., Humaedi, S., & Firsanty, F. P. (2025). Program Pemerintah dan Dinamika Partisipasi Masyarakat untuk Optimalisasi Keberfungsian Sosial. *Focus: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 7(2), 237–249.
- Darmini, R., & Parlindungan, G. T. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*.
- Detik Finance. (2025). *Konflik Lahan dan Investasi di Rempang*.
- Gunawan, R., & Subadi, W. (2021). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bak Air di Desa Kapar Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Indriani, C. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa*. Diss. Universitas Hasanuddin.
- Irfani. (2024). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51–58. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58>
- Kaho, J. R. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2024). *Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan Pemantauan PSN Rempang*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2025). *Catatan HAM Relokasi Warga Rempang*.
- Kompas. (2025). *Penolakan Relokasi*.
- Mannayong, J., & Faisal, M. (2024).

- Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 53–75.
- Mawadzah, A., Mulyawan, R., & Afrilia, U. A. (2023). Partisipasi Masyarakat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) dalam Pembangunan Daerah. *Janitra: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 347–357.
- Naisabur, N., & Salsabila, A. M. (2025). Peran Partisipasi Publik Berbasis Digital (E-Participation) dalam Proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Tantangan dan Optimalisasi. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(3), 74–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.5996/6/yudhistira.v3i3.2144>
- Nastiti, D. M., & Masrurun, Z. Z. (2024). Partisipasi Masyarakat Transmigran dalam Pembangunan Wilayah. *Jurnal Transmigrasi*.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1).
- Nurbaiti. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- OECD. (2023). *Citizen Participation and Inclusive Governance*.
- Poespitoahadi, W., & Fe, F. E. T. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa. *E-Prints Universitas Merdeka*, 18(1), 43–50.
- Pramesti, A. W., & Prayoga, P. E. (2025). Human Rights Impunity in the Implementation of the Rempang Eco City National Strategic Project Policy. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 227–237. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss2.art6>
- Rafinzar, R., & Mardianto, M. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Pulau Semambu Ogan Ilir. *Jurnal Publisitas*.
- Rasyad, P. A., Gading, M., Bintang Hadhani, D. T., Harley, A. B. M., & Zulfikar, F. R. (2024). Diskriminasi dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang. *Socius: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13917404>
- Rizal, S., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 53–75.
- Rizal, S., Tinus, A., & Widodo, R. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang BPJS Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Civic Hukum*, 3(1), 102–110. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7732>
- Slamet, M. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Tempo. (2024). *Konflik PSN Rempang Eco-City*.
- Tempo. (2025). *Relokasi Warga dan Dinamika Sosial Rempang*.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2020). Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Wilcox, D. (1994). *The Guide to Effective Participation*.
- Wulandari, W. (2025). *Resolusi Konflik Pengembangan Eco-City Pulau Rempang di Kota Batam*. IPDN.
- Yanto, P., Jumanah, J., & Sutoto, S. (2024). Analysis of the Implementation of E-Participation in Public Policy in Indonesia: Potential, Challenges and Impact on the Quality of Public Policy. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(2),

182–200.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia. (2025). *Catatan Kritis PSN
Rempang Eco City*.